

**UPAYA PELAKSANAAN SINERGI KEBIJAKAN TRANSPORTASI
SEBAGAI PENUNJANG PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA
DI KOTA BLITAR**

**(Studi pada Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar dan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar)**

Praadilla Surilansih, Bambang Supriyono, Minto Hadi

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: praadilla@gmail.com

ABSTRACT: Realization Efforts Transportation Policy Synergy as Supporting Development Tourism Potency. In developing a synergy then needed a vision and mission which would be reach through the synergy itself. Then from the vision mentioned before it could be developed a synergy which can be run into the smallest part. The results of this research are: 1) Developing Policy of Tourism Potential in Blitar which undertaken by Department of Communication, Informatics and Regional Tourism Government of Blitar basically, in line with the vision and mission of Blitar which make tourism sector as a center in regional Development; 2) In terms of policy synergy efforts of structuring public transportation system in supporting tourism potency at Blitar already held public transport system divided by four traffic lanes and the rest is a tour pedicab that under manage by Department of Communication, Informatics and Regional Tourism Government of Blitar; 3) Form of policy synergies between tourism planning and transportation planning in Blitar only did by dividing public transport route in order to not disrupt the tour pedicab; 4) The main factor which is supporting the synergy between Department of Communication, Informatics and Regional Tourism and Department of Regional Liaison is the exist of vision and mission of Blitar is clearly make the tourism sector as a superior sector which printed on development planning document of Blitar, which became the major resist factor of synergy is the unavailable Regional Regulations or Mayor Regulations which provide the instruction technically to implementing vision and mission of Blitar which fully focused on tourism sector.

Keywords: public policy synergy, transportation policy, and development tourism potency

ABSTRAK: Upaya Pelaksanaan Sinergi Kebijakan Transportasi Sebagai Penunjang Pengembangan Potensi Pariwisata. Dalam mengembangkan suatu sinergi maka harus terdapat suatu visi dan misi yang akan dicapai melalui sinergi tersebut. Kemudian dari visi tersebut dapat dikembangkan suatu sinergi yang dapat dijalankan sampai bagian yang terkecil. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Kebijakan pengembangan potensi wisata di Kota Blitar yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Pemerintah Kota Blitar pada dasarnya telah sesuai dengan visi dan misi Kota Blitar yang menjadikan sektor pariwisata sebagai primadona dalam pembangunan daerah 2) Dalam hal upaya-upaya sinergi kebijakan penataan sistem transportasi umum dalam menunjang potensi wisata di Kota Blitar oleh Dinas Perhubungan Daerah Pemerintah Kota Blitar sudah diadakannya sistem angkutan umum dengan empat jalur selebihnya adalah becak wisata yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Pemerintah Kota Blitar 3) Wujud sinergi kebijakan antara perencanaan pariwisata dengan perencanaan transportasi di Kota Blitar hanya dilakukan dengan membagi rute angkutan kota agar tidak mengganggu becak wisata 4) Faktor utama yang menjadi pendukung adanya sinergi antara antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah dengan Dinas Perhubungan Daerah adalah adanya visi dan misi Kota Blitar yang secara jelas menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang tercantum pada dokumen perencanaan pembangunan Kota Blitar, yang menjadi faktor utama penghambat dari sinergi adalah tidak adanya tidak adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang memberikan instruksi secara teknis untuk mengimplementasikan visi dan misi Kota Blitar yang berfokus pada sektor pariwisata.

Kata kunci: sinergi kebijakan publik, kebijakan transportasi, dan pengembangan potensi pariwisata

Pendahuluan

Kebijakan Otonomi Daerah telah berlaku sejak berdirinya Kesatuan Republik Indonesia dan telah tercantum pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ini memacu setiap daerah untuk mengelola segala potensi sumber daya daerahnya masing-masing secara maksimal melalui kreatifitas dan inovasi dalam rangka mengembangkan, memajukan dan membangun daerahnya. Pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten dan kota diberi kewenangan yang lebih luas sesuai dengan asas desentralisasi.

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial dalam rangka Pembangunan Daerah. Sektor pariwisata memiliki peran yang besar tidak hanya dalam hal meningkatkan devisa, namun juga sebagai solusi terhadap besarnya jumlah pengangguran di Indonesia, sektor ini mampu memberikan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat di sekitar objek wisata tersebut. Daya dukung pariwisata dipengaruhi oleh faktor motivasi wisatawan dan faktor lingkungan biofisik lokasi pariwisata.

Dalam kaitannya maka dapat dilihat bahwa perkembangan potensi pariwisata juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pengembangan potensi pariwisata. Dalam merumuskan kebijakan pariwisata maka diperlukan pula keseimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di sektor lain yang secara langsung bersinggungan dengan sektor pariwisata. Salah satunya adalah terbatasnya sarana transportasi, termasuk hubungan jalur transportasi yang terbatas.

Dalam industri pariwisata, transportasi menjadi hal yang sangat penting. Kebutuhan akan transportasi dituntut oleh pesatnya perkembangan sektor pariwisata. Terdapat hubungan timbal balik antara transportasi dan pariwisata, yaitu kemajuan fasilitas transportasi mendorong kemajuan kepariwisataan dan sebaliknya dalam industri pariwisata dapat menciptakan permintaan akan transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Fungsi dari pengembangan bidang transportasi itu sendiri adalah sebagai sarana untuk mengakses tempat-tempat tujuan wisata. Dengan akses

transportasi yang memadai maka memberikan motivasi kepada wisatawan untuk datang ke daerah tujuan wisata.

Hubungan timbal balik yang terjadi antara sektor pariwisata dan sektor transportasi merupakan asal-usul dari munculnya sinergi kebijakan publik. Kebutuhan manusia terhadap pariwisata yang terus meningkat diiringi dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan transportasi untuk menjangkau tempat-tempat wisata. Hal tersebut kemudian memotivasi munculnya sinergi dalam sektor pariwisata dan sektor transportasi dalam merumuskan suatu kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tersebut. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam kaitannya pembangunan daerah, sinergi kebijakan diperlukan untuk menyatukan atau mempertemukan kepentingan-kepentingan agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien dalam rangka memenuhi kebutuhan publik untuk mewujudkan pembangunan daerah.

Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2002, h.102).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi ini diharapkan dapat menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. kedua, memperbaiki alokasi sumber daya

produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Mardiasmo, 2002, h.6).

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas karena tanpa tujuan, kebijakan tidak memiliki arti bahkan dapat menimbulkan sebuah permasalahan. Tujuan-tujuan kebijakan haruslah terkemas pada sebuah visi kebijakan yang futuristik, artinya bahwa kebijakan publik harus memiliki tujuan yang ingin dicapai dimasa depan. Pendefinisian kebijakan publik oleh para pakar tidak ada yang mutlak digunakan sebagai pedoman pasti karena memang kebijakan publik relatif berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dunn memahami proses pembuatan kebijakan sebagai suatu analisis kebijakan yang merupakan suatu usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan. Usaha ini bermula dari penyajian secara cermat informasi yang menunjukkan adanya masalah kebijakan. Informasi ini oleh analis kebijakan kemudian digunakan untuk membuat informasi tentang alternatif-alternatif kebijakan (Wibawa, 1994, h.55).

Kata sinergi sudah menjadi kata yang tidak asing lagi digunakan dalam pengkajian administrasi publik. Sinergi berasal dari kata *synergos* yang memiliki arti berkerja bersama-sama. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, sinergi berarti kegiatan atau operasi bersama-sama. Dikatakan oleh Rhodes bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik diperlukan adanya kerja sama antara instansi pemerintah yang baik, atau diistilahkan sebagai IGM (*Inter-Governmental Management*). Dalam pelaksanaan konsep tersebut di lapangan diharapkan instansi pemerintah dapat bekerjasama, bersinergi, bahu membahu dalam mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Dikatakan oleh bahwa “*it is about coping with several jurisdictions to solve particular problems and building networks of communication to produce such useful results*” (ini [IGM] adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan berbagai

wilayah yurisdiksi atau sektor untuk memecahkan sebuah persoalan spesifik dengan cara membangun jaringan dan komunikasi dalam rangka mencapai hasil yang bermanfaat). Dari penjelasan ini jelas bahwa sinergi kebijakan publik antar instansi pemerintah merupakan sebuah keharusan untuk dapat mencapai hasil yang maksimal dari tujuan-tujuan kebijakan publik yang dibuat (Rhodes, 1996, h.653). Dilanjutkan oleh Rodhes bahwa kunci dari berhasilnya sinergi kebijakan antar instansi pemerintah itu dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek mendasar yaitu: *problem solving*: dalam hal ini dilihat sampai sejauh mana komitmen dan hasil dari kebijakan itu dalam menyelesaikan masalah bersama yang dihadapi; (2) *intergovernmental games*: dilihat seperti apa tarik menarik kepentingan antar instansi dan bagaimana perbedaan tersebut dapat di atasi; dan (3) *networking*: di sini dilihat bagaimana bangunan jejaring antar instansi tersebut dibangun dan dilaksanakan di lapangan dalam mencapai tujuan atau memecahkan masalah kebijakan publik yang dihadapi.

3. Pembangunan Daerah

Pembangunan adalah proses usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Suryono, 2006, h.2). Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Segi Pembangunan sektoral, pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui berbagai pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah.
- b. Segi pembangunan wilayah, yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah.
- c. Segi pemerintahannya, agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pembangunan daerah perlu berfungsi dengan baik karena itu pembangunan merupakan usaha-usaha untuk mengembangkan dan mempererat pemerintah daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata,

dinamis, serasi, dan bertanggung jawab (Tjokroamidjojo, 1996, h. 23).

Pendayagunaan Potensi Daerah pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, sedangkan potensi diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan dikembangkan.

4. Pariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam pengembangan pariwisata tentunya memerlukan langkah-langkah yang strategis dan terpadu terutama mengenai pendidikan tenaga-tenaga kerja khususnya yang bergerak di bidang pariwisata dan perencanaan pengembangan fisik. Kedua hal tersebut saling terkait sehingga pengembangan tersebut menjadi realistis dan proporsional dalam mendukung majunya sektor ini. Agar suatu obyek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu obyek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah sarana dan prasarana obyek wisata tersebut. Karena sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung dari pengembangan obyek wisata.

5. Sistem Transportasi

Secara umum UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai pembinaan *multi stakeholder* (lima institusi), pengaturan lebih terperinci mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, penajaman pada formulasi tujuan, pendefinisian istilah lalu lintas dan angkutan jalan sebagai suatu sistem yang unsurnya mencakup semua aspek, pembentukan forum lalu lintas dan angkutan jalan, dana preservasi jalan dan pengelolaannya, serta mendorong pemberdayaan industri di bidang LLAJ.

Dalam kebijakan transportasi yang berada dalam kerangka otoda, UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pula pembagian wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.

Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah:

1. Kebijakan pengembangan potensi wisata di Kota Blitar yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Blitar.
2. Upaya-upaya sinergi kebijakan penataan sistem transportasi umum dalam menunjang potensi wisata di Kota Blitar oleh Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar.
3. Wujud sinergi kebijakan antara perencanaan pariwisata dengan perencanaan transportasi di Pemerintah Kota Blitar.
4. Faktor pendukung dan penghambat sinergi kebijakan antara Dinas Perhubungan Daerah dengan Dinas Pariwisata dalam mewujudkan Kota Blitar sebagai Kota Wisata. Penelitian ini dilakukan di Kota Blitar. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Blitar yaitu Makam Bung Karno sebagai kawasan wisata religi.

Metode yang digunakan adalah metode yang dikembangkan oleh Morse dan Field yang menggunakan empat proses kualitatif yaitu, *Comprehending, Synthesizing, Theorizing, Recontextualizing*.

Pembahasan

1. Kebijakan pengembangan potensi wisata di Kota Blitar

Sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah bahwa visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar sebagai berikut: "Menuju Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata yang Berwawasan Kebangsaan". Adapun misinya antara lain 1) Mewujudkan profesionalisme pelayanan masyarakat 2) Mewujudkan Kota Blitar sebagai Kota Wisata Kebangsaan dengan menetapkan DTW melalui Destinasi Pariwisata 3) Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan mencintai kesenian tradisional 4) Mewujudkan masyarakat yang informatif dan mewujudkan komunikasi dua

arah antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Program-program kepariwisataan yang terdapat di Kota Blitar, saat ini masih berpusat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah. Tujuan dari program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah adalah meningkatkan daya tarik wisata kebangsaan Kota Blitar. Program Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata diuraikan dalam kegiatan: Pembangunan outlet wisatawan MBK, Pengembangan lahan parkir Water Park Sumber Udel, Pembangunan fasilitas wisata di Istana Gebang, Pengadaan angkutan layanan wisata MBK-Kampung wisata, Pembangunan sarana ibadah di kawasan wisata MBK, Pembangunan kios makanan dan souvenir khas, Rehabilitasi Fasilitas Umum, Pembuatan papan peta/rute wisata, Pembuatan papan petunjuk di kawasan wisata MBK, Pengadaan *sound system* layanan informasi di MBK dan Pengadaan CCTV di MBK dan PIPP. Untuk program Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan kegiatannya adalah Kerjasama Dengan Forum Kediri Raya dan Kerjasama dengan biro perjalanan wisata. Program Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga atau dunia usaha diwujudkan dalam kegiatan Koordinasi dengan dunia usaha bidang pariwisata. Dan untuk program Promosi dan pengembangan potensi kelurahan dalam rangka mendukung wisata daerah diwujudkan dalam kegiatan Pengembangan Agro wisata Blimbing Karang Sari dan Pengembangan Kampung Wisata.

Berdasarkan dokumen LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Pemerintah Kota Blitar diuraikan kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata di Kota Blitar, adalah lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata khususnya dalam pengemasan daya tarik wisata ke dalam produk pariwisata dan paket-paket wisata. Keterbatasan sumber daya manusia dalam perencanaan program dan pengendalian pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata belum maksimal khususnya disekitar daya tarik wisata dan kawasan wisata. Karakteristik mayoritas

wisatawan yang datang hanya ramai pada bulan-bulan tertentu, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat maupun kepercayaan. Keterpaduan dan koordinasi antar stakeholder masih lemah, tingginya ego sektoral menyulitkan koordinasi antar dinas sehingga ada stigma bahwa pengembangan pariwisata hanya bertumpu pada unit kerja yang membidangi saja pada pariwisata mempunyai proses produksi yang bersifat holistik dan multisektor. Disadari pula bahwa pariwisata identik dengan biaya besar tetapi produk atau dampaknya sering tidak teraba atau terlihat karena *multiplayer effect* dan devisa langsung dirasakan masyarakat, sehingga hasil tidak bisa hanya dihitung dari sisi *marginal cost* yang diinvestasikan, hal ini sering menimbulkan keragu-raguan para penentu kebijakan.

2. Upaya-upaya sinergi kebijakan penataan sistem transportasi umum dalam menunjang potensi wisata di Kota Blitar

Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar Tahun 2006–2010 disebutkan Visi dinas sebagai berikut: “Terwujudnya sistem jasa dan pelayanan Transportasi yang mempunyai daya dorong pembangunan dan kepariwisataan dalam menyongsong era globalisasi dan pasar bebas tahun 2006“. Adapun Misi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar untuk Renstra 2006-2010 adalah 1) Peningkatan SDM dari segi Kualitas dan kuantitas 2) Mewujudkan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kualitas pelayanan jasa transportasi yang handal, unggul dan biaya murah 3) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi 4) Mewujudkan usaha dibidang transportasi yang mampu bersaing 5) Mewujudkan teknologi kendaraan bermotor yang ramah lingkungan 6) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Dari rencana strategis dari Dinas Perhubungan Daerah untuk tahun 2006-2010 di atas, terlihat jelas bahwa ada visi yang jelas untuk membangun sinergi dengan pengembangan sektor pariwisata sangat jelas. Akan tetapi hal tersebut tidak terlihat pada misi yang tidak mencerminkan

dukungan kegiatan di sektor transportasi terhadap pariwisata.

Sedangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar 2011-2015 ditetapkan visi dinas sebagai berikut “Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Jasa Perhubungan Tahun 2015 Yang Akomodatif Dan Responsif”. Adapun misi dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2011–2015 adalah sebagai berikut 1) Perwujudan peningkatan kinerja aparatur serta sistem perencanaan program dan keuangan yang akuntabel 2) Perwujudan sistem transportasi yang handal melalui Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 3) Perwujudan Sarana Prasarana Transportasi yang memadai 4) Perwujudan pelayanan prima terminal orang dan barang 5) Perwujudan pelayanan jasa perpajakan yang responsif 6) Perwujudan keselamatan pengguna jalan dan pengguna angkutan umum.

Pada LAKIP Dinas Perhubungan Daerah Pemerintah Kota Blitar bahwa terdapat 6 (enam) kebijakan pokok sebagai pelaksanaan Renstra 2011-2015 dan Renja Dinas Perhubungan Daerah tahun 2011 yaitu, pertama, menyangkut pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan sarana prasarana kantor yang presentatif. Kedua adalah kebijakan inovasi rekayasa jalan sesuai dengan perkembangan atau kondisi. Ketiga adalah kebijakan fasilitasi sarana prasarana transportasi sesuai kebutuhan. Keempat adalah kebijakan peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat pengguna terminal orang dan barang. Kelima adalah kebijakan peningkatan pelayanan perpajakan yang diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi peningkatan kinerja juru parkir. Dan keenam adalah kebijakan mewujudkan keselamatan awak dan pengguna angkutan.

Maka terlihat bahwa tidak ada kegiatan maupun program yang mengindikasikan adanya sinergi antara kebijakan-kebijakan di sektor transportasi yang menunjang perkembangan sektor pariwisata.

Dari sudut pandang Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar, nuansa terwujudnya sinergi lebih tampak, meskipun tidak diwujudkan secara spesifik dalam program maupun

kegiatan, yang terdapat dalam LAKIP 2011 pada bagian manfaat, pada poin ke tiga yang menyebutkan bahwa manfaat laporan tersebut yaitu sebadai “daya dorong (*supporting unit*) bagi SKPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Akan tetapi belum dijelaskan pada sektor yang mana secara spesifik sinergi tersebut dapat dilakukan. Juga terlihat dalam dokumen LAKIP tentang sinergi pada bagian analisis eksternal dan internal. Di mana pada aspek positif (kekuatan dan peluang) dikatakan sebagai berikut:

- 1). Terjalannya sistem koordinasi antar bagian, bagian dengan pimpinan serta lintas SKPD yang harmonis;
- 2). Potensi wisata Kota Blitar yang tidak bisa dimiliki oleh Kabupaten/Kota manapun yaitu berupa Makam Bung Karno. Keberadaan Makam Bung Karno ini mampu menjadi ikon pariwisata bagi Kota Blitar;
- 3). Keberadaan Istana Gebang maupun pembangunan Perpustakaan Bung Karno mampu menguatkan ikon Makam Proklamator sebagai obyek daya tarik wisata bernuansa kebangsaan yang mampu menyedot wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- 4). Meningkatnya teknologi transportasi, termasuk penataan jalan-jalan menuju lokasi wisata;
- 5). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Blitar diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata dengan dukungan sektor dan lembaga terkait;
- 6). Terbangunnya komitmen kerja sama antara Pemerintah Kota Blitar dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota di sekitarnya untuk pemanfaatan PIPP;
- 7). Kerjasama promosi pariwisata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta yang semakin erat;

Sedangkan pada aspek negatif (kelemahan dan ancaman) adalah keterpaduan dan koordinasi antar stakeholder masih lemah, tingginya ego sektoral menyulitkan koordinasi antar dinas sehingga ada stigma

bahwa pengembangan pariwisata hanya bertumpu pada unit kerja yang membidangi saja pada pariwisata mempunyai proses produksi yang bersifat holistik dan multi-sektor.

Dari hal tersebut, pada aspek positif pada poin 3 dikatakan secara eksplisit adanya keterkaitan pengembangan sektor wisata terkait dengan transportasi. Sedangkan pada poin 4, 5, dan 6 disebutkan pentingnya sinergi antar lembaga untuk menunjang berkembangnya sektor kepariwisataan di Kota Blitar. Sedangkan pada aspek negatif dikatakan secara eksplisit tentang pentingnya sinergi dalam pengembangan sektor kepariwisataan di Kota Blitar.

Dari rencana strategis dari Dinas Perhubungan Daerah untuk tahun 2006-2010 di atas, terlihat jelas bahwa ada visi yang jelas untuk membangun sinergi dengan pengembangan sektor pariwisata sangat jelas. Hal itu dapat dilihat di dalam visi yang secara tegas mencantumkan dukungan Dinas Perhubungan Daerah dengan pengembangan wisata, yaitu "Terwujudnya sistem jasa dan pelayanan Transportasi yang mempunyai daya dorong pembangunan dan kepariwisataan dalam menyongsong era globalisasi dan pasar bebas". Akan tetapi hal tersebut tidak terlihat pada misi maupun tujuan dan sasaran yang tidak mencerminkan dukungan kegiatan di sektor transportasi terhadap pariwisata. Sedangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Daerah, Daerah Kota Blitar 2011-2015 ditetapkan visi dinas sebagai berikut "Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Jasa Perhubungan Tahun 2015 Yang Akomodatif Dan Responsif". Dari penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa pada kurun waktu 2011-2015 tidak ada kejelasan sinergi antara kegiatan-kegiatan dan program di Dinas Perhubungan Daerah yang menunjang sektor Pariwisata.

3. Wujud sinergi kebijakan antara perencanaan pariwisata dengan perencanaan transportasi di Pemerintah Kota Blitar

a. *Problem Solving*: bagaimana masalah pengembangan potensi wisata di Kota Blitar menjadi masalah bersama antara Dinas Pariwisata dengan Dinas Perhubungan

Pada dokumen LAKIP baik Dinas Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Daerah maupun Dinas Perhubungan Kota Blitar, dikatakan secara eksplisit adanya keterkaitan pengembangan sektor wisata terkait dengan transportasi, yaitu "meningkatnya teknologi transportasi, termasuk penataan jalan-jalan menuju lokasi wisata". Berikutnya dikatakan bahwa "Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Blitar diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata dengan dukungan sektor dan lembaga terkait". Di lanjutkan pada poin berikutnya yang menyebutkan "Terbangunnya komitmen kerjasama antara Pemerintah Kota Blitar dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota di sekitarnya untuk pemanfaatan PIPP" dan poin 6 yang mengatakan "Kerjasama promosi pariwisata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta yang semakin erat". Hal-hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran untuk melihat masalah kepariwisataan sebagai "masalah bersama". disebutkan pentingnya sinergi antar lembaga untuk menunjang berkembangnya sektor kepariwisataan di Kota Blitar. Sedangkan pada aspek negatif dikatakan secara eksplisit tentang pentingnya sinergi dalam pengembangan sektor kepariwisataan di Kota Blitar.

Sedangkan pada aspek negatif (kelemahan dan ancaman) dikatakan sebagai berikut: "Keterpaduan dan koordinasi antar stakeholder masih lemah, tingginya ego sektoral menyulitkan koordinasi antar dinas sehingga ada stigma bahwa pengembangan pariwisata hanya bertumpu pada unit kerja yang membidangi saja pada pariwisata mempunyai proses produksi yang bersifat holistik dan multisektor (LAKIP Dinas Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Daerah Kota Blitar 2011)".

b. Inter-Governmental Games: apa kendala, hambatan dan potensi masing-masing dinas dalam melakukan sinergi kebijakan

Sedangkan pada aspek negatif (kelemahan dan ancaman) dikatakan dalam dokumen LAKIP Dinas Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Daerah Kota Blitar 2011 sebagai berikut: “Keterpaduan dan koordinasi antar *stakeholder* masih lemah, tingginya ego sektoral menyulitkan koordinasi antar dinas sehingga ada stigma bahwa pengembangan pariwisata hanya bertumpu pada unit kerja yang membidangi saja pada pariwisata mempunyai proses produksi yang bersifat holistik dan multisektor”.

Di Dinas Perhubungan, kesadaran untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam melakukan sinergi sudah dimunculkan dalam Dokumen LAKIP Dinas Perhubungan Daerah tahun 2011 pada sub bab Sasaran 4 yang menyebutkan “Terwujudnya pelayanan prima terminal orang dan barang”. Di dalam sasaran ini dikatakan bahwa beberapa permasalahan yang ditemui adalah keberadaan sarana dan prasarana di terminal kurang didukung oleh dinas terkait (DKP, LH, PU, DINKES), dan dikatakan bahwa salah satu upaya pemecahan masalah tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi antar dinas terkait. Dari dokumen-dokumen tersebut terlihat bahwa kesadaran akan pentingnya sinergi sebenarnya telah ada dan dirasakan oleh masing-masing dinas, hanya saja perwujudannya belum nampak seperti apa yang seharusnya.

c. Network: bagaimana bentuk jejaring yang pernah dilakukan, evaluasi pelaksanaannya dan fakta sinergi kebijakan yang ada saat ini

Dari sisi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar, itikad bentuk jejaring yang pernah dilakukan dapat dilihat di dalam visi yang secara tegas mencantumkan dukungan Dinas Perhubungan Daerah dengan pengembangan wisata, yaitu “Terwujudnya sistem jasa dan pelayanan Transportasi yang mempunyai daya dorong pembangunan dan kepariwisataan dalam menyongsong era globalisasi dan pasar bebas”. Akan tetapi hal tersebut tidak terlihat pada misi maupun tujuan dan sasaran yang tidak mencerminkan

dukungan kegiatan di sektor transportasi terhadap pariwisata.

Sedangkan dari sisi Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar dikatakan secara eksplisit adanya keterkaitan pengembangan sector wisata terkait dengan transportasi, yaitu “meningkatkan teknologi transportasi, termasuk penataan jalan-jalan menuju lokasi wisata”. Berikutnya dikatakan bahwa “Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Blitar diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata dengan dukungan sektor dan lembaga terkait”.

4. Faktor pendukung dan penghambat sinergi kebijakan

Dari dokumen LAKIP Dinas Perhubungan Daerah 2011 dikatakan bahwa faktor pendukung yang ada selama ini adalah adanya dukungan dari SKPD lain dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Dinas Perhubungan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan serta manajemen kontrol sarana dan prasarana lalu-lintas yang belum maksimal. Sedangkan dalam dokumen LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar 2011 faktor penghambat terjadinya sinergi kebijakan dikarenakan belum memadainya kualitas tenaga yang menguasai perencanaan dan melaksanakan program. Ditambahkan dalam dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah 2012 mengatakan bahwa sulitnya terjadinya sinergi kebijakan karena kurangnya kuantitas dan kualitas peningkatan sarana prasaran kepariwisataan Kota Blitar sehingga belum bisa memberikan layanan yang optimal kepada wisatawan, serta kawasan wisata yang berada di daerah pemukiman mengakibatkan sulitnya menertibkan parkir pengunjung atau wisatawan.

Dapat dikatakan bahwa faktor pendukung adanya sinergi adalah adanya visi dan misi Kota Blitar yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, yang mengu-

mandangkan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor unggulan yang dimiliki oleh Kota Blitar, yang kemudian secara tidak langsung memberikan amanah bagi seluruh SKPD di Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung visi dan misi tersebut.

Sedangkan hambatan dilakukannya sinergi adalah tidak adanya peraturan daerah atau peraturan walikota yang secara teknis menjadi landasan bagi SKPD untuk melakukan sinergi dalam mengimplementasikan visi misi Kota Blitar, Kurangnya kesadaran dari para sumber daya manusia yang terdapat di SKPD-SKPD terkait dalam mengimplentasikan visi dan misi Kota Blitar dalam pembuatan kebijakan atau program kerja.

Kesimpulan

1. Kebijakan pengembangan potensi wisata di Kota Blitar yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Pemerintah Kota Blitar pada dasarnya telah sesuai dengan visi dan misi Kota Blitar yang menjadikan sektor pariwisata sebagai primadona dalam pembangunan daerah. Berangkat dari Makam Bung Karno sebagai ikon utama, yang kemudian menjadikan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata minat khusus yang bernafaskan wawasan kebangsaan. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan membuat objek-objek wisata pendukung yang selaras dengan nafas pariwisata Kota Blitar yaitu wawasan kebangsaan.
2. Upaya sinergi kebijakan penataan sistem transportasi umum dalam menunjang potensi wisata di Kota Blitar telah diadakannya sistem angkutan umum dengan empat jalur yang pada dasarnya telah melewati beberapa objek wisata di Kota Blitar oleh Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Namun, ini belum menjadi maksimal karena masih terdapat beberapa objek wisata yang potensial yang belum tersentuh jalur angkutan kota, jadwal keberangkatan angkutan kota yang tidak menentu membuat kurang maksimalnya pelayanan kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke objek-objek wisata.

Kemudian muncul becak wisata yang dikelola dibawah Dinas Komunikasi, informatika dan pariwisata daerah Kota Blitar. Adanya becak wisata ini juga belum meberikan pelayanan yang maksimal, karena hanya memberikan fasilitas untuk mengantarkan wisatawan ke beberapa objek wisata saja. Sedangkan objek wisata lain, seperti kampung wisata kerajinan dan agro blimbing belum dapat diakses menggunakan layanan umum, wisatawan harus menggunakan kendaraan sendiri. Saat ini layanan sarana transpotasi yang ada hanya becak dan angkutan kota.

3. Wujud sinergi kebijakan antara perencanaan pariwisata dengan perencanaan transportasi di Kota Blitar hanya dilakukan dengan membagi rute angkutan kota agar tidak mengganggu becak wisata. Namun pada kenyataannya masih terjadi perebutan penumpang antara angkutan kota yang terkoordinasi di bawah Dinas Perhubungan Daerah dengan becak wisata yang terkoordinasi di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan pariwisata, becak wisata dan angkutan kota pun tetap tidak mematuhi rute yang telah ditentukan. Dari sini dapat dilihat bahwa belum terdapat sinergi secara langsung melalui koordinasi yang dilakukan antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah dengan Dinas Perhubungan Daerah dalam menangani masalah transportasi yang menjadi sarana mobilitas wisatawan ke daerah-daerah objek wisata yang memberikan solusi sebagai inovasi dalam pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kota Blitar dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
4. Faktor utama yang menjadi pendukung adanya sinergi antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah dengan Dinas Perhubungan Daerah adalah adanya visi dan misi Kota Blitar yang secara jelas menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang ada di Kota Blitar yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Pemerintah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah

sebagai acuan bagi seluruh SKPD di Pemerintah Kota Blitar untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dalam kegiatan-kegiatan dan program kerja. Kemudian yang menjadi faktor utama penghambat dari sinergi adalah tidak

adanya tidak adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang memberikan instruksi secara teknis untuk mengimplementasikan visi dan misi Kota Blitar yang berfokus pada sektor pariwisata.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (2004a) **Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**. Malang, Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. (2008b) **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Arah Pembangunan Perhubungan Kota Blitar 2025 "Pendukung Utama" Implementasi Visi Daerah, [internet] Available from <<http://cakrawala.blitarkota.net/cakra.php/2010/06/30/arrah-pembangunan-perhubungan-kota-blitar-2025-pendukung-utama-implementasi-visi-daerah>> [Accessed: 12 Januari 2013]
- Dunn, William N. (1999) **Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2011.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Pariwisata Daerah Tahun 2009
- Lubis, Sebaktian. (2009) **Sinergi Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam di Laut yang Diharapkan**, [internet] Available from <<http://mgi.esdm.go.id/content/sinergi-pengelolaan-sumber-kekayaan-alamdi-laut-yang-diharapkan>> [Accessed : 12 Januari 2013]
- Mardiasmo (2002) **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta, Penerbit ANDI.
- Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Pariwisata Daerah Tahun 2012.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2006-2010.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025.
- Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Pariwisata Daerah Kota Blitar 2011-2015.
- Rencana Strategis Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar 2011-2015.
- Rencana Tata Ruang Kota Blitar Info Seputar Draft RTRW 2008-2028, [internet] Available from <www.rtrw.blitarkota.net> [Accessed: 13 Januari 2013]
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar 2008-2028
- Rhodes, R.A.W. (1996) **The New Governance: Governing without Government**. London, Wiley-Blackwell.
- Tjkroamidjojo, Bintoro. (1996) **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Jakarta, LP3S.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wibawa, Samodra. (1994) **Kebijakan Publik, Proses dan Analisa**. Jakarta, Intermedia.